

Ringkasan Hasil Seminar Nasional  
**Meluruskan Jalan Reformasi:**  
MERUMUSKAN PILAR-PILAR PEMANDU BANGSA

**Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003**

**A. Lahirnya Gerakan Reformasi**

- Pada awalnya Orde Baru lahir sebagai koreksi total terhadap pelaksanaan pemerintahan Orde Lama. Akan tetapi, pada akhirnya pemerintah Orde Baru pun menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu muncullah Gerakan Reformasi (GR) untuk kembali ke cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Sejak awal 1998 GR bergulir di kampus-kampus dengan mahasiswa sebagai ujung tombaknya. GR tersebut merupakan reaksi terhadap dominasi kekuasaan dan pengebirian hak-hak demokrasi oleh Pemerintah Orde Baru.
- Gerakan Reformasi mengajukan 4 tuntutan, yakni (a) Amandemen UUD 1945, (b) Berantas praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), (c) Cabut paket 5 UU Politik yang dipandang menghambat perkembangan demokrasi, dan (d) Cabut Dwifungsi ABRI.
- Keempat tuntutan reformasi tersebut sebenarnya hanyalah tujuan antara semata-mata. Tujuan GR yang paling esensial adalah pelaksanaan secara konsekuen nilai-nilai hakiki Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Pelaksanaan semangat Reformasi, pada awalnya cukup memberi harapan karena telah menghasilkan (a) Kemauan mengamandemen UUD 1945, (b) Pencabutan Paket 5 UU Politik, (c) Penyelenggaraan Pemilu 1999 yang paling bersih dan jujur pasca Pemilu 1955, (d) Penyelenggaraan kehidupan pers yang bebas, dan (e) Pemisahan TNI dan Polri.
- Tetapi selanjutnya prestasi Pemerintah Transisi sangat mengecewakan rakyat. Jajak pendapat oleh Kompas dan Tempo menunjukkan dari waktu ke waktu terjadi penurunan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. *Transparency International* menyimpulkan pada 2003 Indonesia merupakan negara terkorup nomor 6 dari 133 negara di dunia. Menurut Survei *World Competitiveness Index* tahun 2003, Country Competitiveness Indonesia berada pada urutan ke 28 dari 30 negara yang berpenduduk 20 juta lebih, menurut *Human Development Report 2003* yang dikeluarkan UNDP, Indonesia menempati urutan ke 110 dari 173 negara, berada di bawah

Filipina, Cina, dan bahkan Vietnam. PERC, menempatkan *country risk* Indonesia pada urutan ke 150 dari 185 negara.

## B. Pelaksanaan Reformasi

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah ternyata bukannya mampu mengatasi kondisi multi-krisis yang telah melanda bangsa sejak akhir 1997, tetapi justru menimbulkan masalah baru:

### 1. Umum

- Hampir semua pembicara pada Seminar Meluruskan Jalan Reformasi (MJR) berkesimpulan bahwa Pemerintah Transisi belum berhasil mengatasi kondisi multi-krisis dan masalah pokok bangsa, antara lain, (a) menciptakan stabilitas politik dan meredam konflik sosial, (b) mengikis praktek KKN, dan (c) mempertahankan supremasi hukum serta menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai ungkapan digunakan untuk menggambarkan kondisi bangsa saat ini: "... *kerusakan bangsa sudah hampir sempurna ...*" (A. Syafii Ma'arif), "... *terjadi pengkhianatan terhadap semangat Reformasi ...*" (Romo Frans-Magnis Suseno), dan "... *bangsa Indonesia dalam kondisi gridlock ...*" (Nurcholis Madjid).
- Para pembicara menyimpulkan bahwa kondisi paling buruk ini terjadi karena para penyelenggara pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan keuntungan golongan dan kelompok, serta tidak memiliki standar moral dan etik yang harus dimiliki oleh para pemegang kekuasaan.
- Hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan negara. Amandemen UUD 1945 telah menciptakan inkonsistensi antara landasan filosofis dan ideologis dengan aturan dasar tentang bentuk, susunan serta tata penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Sistem *check and balance* bukannya tercipta tetapi telah menimbulkan kondisi ekstrem baru yakni **dominasi legislatif yang terlalu kuat**.
- Program reformasi tidak berjalan karena lemahnya komitmen elite politik pada pencapaian agenda reformasi.

### 2. Masalah Ideologi, Moral dan Pendidikan

- Hampir semua pembicara telah mengajukan konstataasi bahwa selama lima tahun sejak reformasi digulirkan telah terjadi pendangkalan ideologi kenegaraan yang selanjutnya menyebabkan menipisnya semangat kebangsaan dan persatuan;
- Legitimasi simbolik atas Reformasi telah mencemari kemurnian dan

kredibilitas Gerakan tersebut.

- Pelaksanaan reformasi dalam kenyataan lebih didominasi dan dicemari oleh “preman politik” dan “praktek politik uang”.
- Rendahnya komitmen berbagai komponen bangsa untuk mengatasi krisis multidimensi dan untuk melaksanakan agenda reformasi.
- Tumbuhnya *mindset* yang terbalik: masalah aksidental-prosedural dijadikan prinsip, sedang prinsip dan kebenaran diabaikan.
- Kepentingan politis dan monopoli kebenaran oleh partai berkuasa telah menyebabkan lemahnya komitmen pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai filsafat dasar kehidupan kenegaraan sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa.
- Pembeneran diri dan ketidakmauan rezim mengakui kesalahan yang pernah dilakukan, timbul gejala pensakralan kekuasaan.
- Akibat dari semuanya, berkembang luaslah di masyarakat perasaan pesimisme, apatisme dan *mutual distrust*.

### 3. Masalah Sosial-Budaya

- Merosotnya akhlak dan moralitas elit bangsa serta “penghianatan” terhadap ideologi Pancasila karena:
  - Eksklusivisme kelompok
  - Ketidakpedulian pada kesenjangan pembangunan
  - Merebaknya praktek KKN pada semua cabang kekuasaan
  - Sistem politik yang berbasis pada ikatan etnis serta primordialisme agama dan digalang atas dasar sentimen pribadi.
- Penggerak utama reformasi dan para cendekia mengalami inersia dan kehabisan energi sehingga masyarakat menjadi apatis dan pesimis.
- Penurunan kepercayaan rakyat dan kredibilitas pemimpin di mata rakyat.
- Kooptasi Gerakan Reformasi oleh partai politik untuk tujuan sempit dan jangka pendek.
- Toleransi terhadap perbedaan kultural terlalu rendah sementara toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan sangat tinggi.

### 4. Masalah Ekonomi

- Ekonomi nasional sebenarnya belum pulih seperti dugaan publik, seperti ditunjukkan besarnya, hampir 50 persen, dana lembaga perbankan yang tidak tersalurkan ke sektor produktif.
- Belum terwujudnya demokrasi ekonomi karena kebijakan pemerintah tetap condong pada sedikit pelaku besar yang dekat dengan penguasa. Pembangunan ekonomi tidak berpihak pada ekonomi rakyat dan kemandirian ekonomi nasional.

- Reformasi ekonomi dilaksanakan secara neo-liberal yang menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar (reformasi ekonomi '*kebablasan*').
- Campur tangan asing (terutama IMF) terlalu besar, akan tetapi kepercayaan luar negeri tetap rendah.
- Nilai dasar dan moral Pancasila diabaikan dalam sistem ekonomi nasional.

## 5. Masalah Sains dan Teknologi

- Kemampuan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan IPTEKS untuk pengelolaan sumberdaya alam nasional masih rendah karena rendahnya kualitas SDM IPTEKS dan lemahnya kebijakan insentif.
- Konsep-konsep pengembangan yang sudah bagus belum dilanjutkan dengan kompetensi operasional, pengembangan jaringan, dan sikap moral yang benar.
- Rendahnya daya saing, produktivitas dan kreativitas bangsa.
- Rendahnya dukungan pada pengembangan IPTEKS & Litbang.
- Pengembangan teknologi untuk *renewable resources* masih terbatas.
- Nilai tambah ekonomis lebih bertumpu pada eksploitasi sumberdaya (alam & manusia).

## 6. Masalah Hukum & HAM

- Kepercayaan rakyat pada lembaga peradilan semakin merosot karena: korupsi, inkonsistensi, diskriminasi, dan adanya intervensi penguasa dalam penegakan hukum.
- Formulasi hukum tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat.
- Tidak adanya keadilan pada akses terhadap sumber daya alam sebagai hak ekonomi masyarakat akibat minimnya peraturan dan tindakan represif.
- Amandemen UUD 1945 melahirkan anomali konstitusi yang berimplikasi pada proses dominasi legislatif terhadap eksekutif (ketegangan DPR-Pemerintah terus terjadi).
- Praktek pengadilan kurang dilandasi rasa keadilan dan akal sehat. *Horse-trading* dan *money politics* terus terjadi dalam proses hukum.

## 7. Masalah Penciptaan *Good Governance*

- Pemaknaan *good governance* tidak kontekstual dan tidak terjaga konsistensinya.
- Rendahnya komitmen dan tidak adanya kesepakatan etis pada pelaksanaan *good governance* pada berbagai level dan eksponen

- penyelenggara pemerintahan.
- Laju pembaruan *good governance* sangat lambat karena belum kuatnya tekanan *civil society*.
- Pengembangan birokrasi yang bersih terhambat oleh rendahnya kesejahteraan pegawai negeri dan penerapan sanksi yang tidak ketat.
- Terjadi proses “saling menghindar” dari tanggung jawab melakukan perubahan.
- Tata kelembagaan untuk mengaktualisasi *good governance* belum dikembangkan.
- Tidak adanya keteladanan pemimpin nasional.

## 8. Masalah Politik dan Keamanan

- Suburnya patronase partai politik.
- Penyelenggaraan otonomi daerah tidak sehat.
- Sentimen anti militerisme telah berkembang menjadi sentimen anti-militer yang mengarah pada marginalisasi TNI.
- Transformasi ABRI menuju TNI profesional belum sepenuhnya terlaksana karena kuatnya tarikan agar militer kembali melaksanakan dwifungsi.
- Tidak adanya ancaman dari luar, menyebabkan militer ikut sibuk dengan masalah kedalam (*comprehensive security* menjadi masalah baru).
- Pemisahan TNI dan Polri secara cepat telah menciptakan permasalahan baru dalam redefinisi, reposisi dan reaktualisasi TNI dan Polri.

## C. Kesimpulan dan Rekomendasi Arah Kebijakan

### 1. Kesimpulan dan Rekomendasi Arah Kebijakan Umum

- Meninjau ulang Amandemen UUD 1945 untuk menciptakan landasan hukum yang lebih murni dan konsekuen bagi pengaturan kehidupan kenegaraan serta penyelenggaraan pemerintahan.
- Mencantumkan pada Pasal 37 UUD 1945 ketentuan “... perubahan UUD dilakukan oleh Komisi Konstituante atas usul dari 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ...”.
- Menjamin keberhasilan Pemilu dan terpilihnya Presiden, Wakil Presiden dan anggota parlemen yang visioner, bermoral dan berintegritas tinggi, serta mempunyai komitmen tinggi pada nilai-nilai Pancasila.
- Memantapkan fungsi kampus sebagai pusat penggerak politik moral, pengawal pelaksanaan reformasi, termasuk memonitor pemenuhan janji pemerintah seperti tercantum dalam *White Paper* tentang Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Program

Bantuan IMF seperti tercantum dalam Inpres No. 5 tahun 2003 .

- Menciptakan sinergi positif dengan media massa dan semua unsur masyarakat dalam memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Rekomendasi Arah Kebijakan Ideologi, Moral & Pendidikan

- Revitalisasi Pancasila sebagai filsafat dasar kenegaraan dan landasan ideologis kehidupan berbangsa yang terbuka dengan tafsiran yang multikultural dan berasas kerakyatan (bukan politis & penyeragaman).
- Mengembangkan moral Pancasila melalui pendidikan yang dilandasi kepedulian religius dan pragmatisme.
- Merekonstruksi budaya politik dengan menguatkan pilar-pilar kehidupan demokrasi.
- Mengembangkan pemikiran intelektual dan massa dengan *platform* yang jelas dengan dilandasi oleh nilai-nilai yang telah dirintis para pendiri negara.
- Mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan martabat manusia.

## 3. Rekomendasi Arah Kebijakan Sosial-Budaya

- Melakukan tindakan anti korupsi secara konsekuen.
- Menguatkan modal sosial untuk menumbuhkan *mutual trust* dan menjaga integrasi bangsa.
- Merevitalisasi semangat dan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika.
- Mendidik dan membina masyarakat menjadi konstituen yang rasional dan kritis.
- Melakukan kampanye pencerdasan bangsa agar Pemilu melahirkan pemimpin yang bisa menjadi *bridging leaders* yang bersih, cerdas dan kuat serta mampu menumbuhkan *trust* sebagai *social capital* bangsa Indonesia.

## 4. Rekomendasi Arah Kebijakan Ekonomi

- Menerapkan secara konsekuen sistem ekonomi kerakyatan sebagai pelaksanaan demokrasi ekonomi sesuai ketentuan pasal 33 dan 34 UUD '45.
- Melaksanakan strategi kombinasi pertumbuhan dan pemerataan dengan cara:
  - Mengembangkan *production-driven economy*
  - Intervensi pemerintah di pasar untuk meningkatkan dasar tukar

- o komoditi pertanian
- o Meningkatkan daya beli masyarakat antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai
- Memperbesar *degree of freedom* bangsa dalam pengelolaan ekonomi nasional.
- Merenegosiasi pembebasan dan penjadwalan utang LN, melalui kebijakan *debt swaps*.
- Memantapkan integrasi pasar nasional.
- Meninjau ulang dan menghentikan penjualan BUMN yang profitable pada negara asing

## 5. Rekomendasi Arah Kebijakan Sains & Teknologi

- Mengembangkan IPTEKS yang mampu mendukung pengembangan industri berdasar *high-road industrial competitiveness*.
- Melaksanakan kebijakan pengembangan industri melalui *clustering* pengembangan berdasar potensi SDM dan SDA yang tersedia.
- Meningkatkan daya saing industri dengan intervensi pemerintah yang efektif (regulasi, *tax-incentives* dan pengembangan infrastruktur riset).
- Mendorong pengembangan SDM IPTEKS melalui pendidikan yang inovatif dan kreatif.
- Mengintegrasikan IPTEKS dan industri dalam semua jenjang pendidikan.
- Mengembangkan kemitraan dan sinergi antara lembaga pendidikan, riset, industri dan pemerintah.

## 6. Rekomendasi Arah Kebijakan Hukum & HAM

- Restorasi dan reformasi moral aparat penegak hukum melalui audit terhadap aparat penegak hukum.
- Meningkatkan komitmen aparat penegak hukum pada keadilan dan menerapkan akal-sehat dalam penegakan hukum.
- Menjamin hak-hak ekonomi yang berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Melakukan amandemen atas amandemen UUD '45 yang lebih konseptual dan utuh dengan melibatkan partisipasi publik.
- Melakukan perbaikan hukum mencakup: Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, sistem hukum yang responsif, *enforcement* yang non-diskriminatif dan sistem peradilan yang independen.

## 7. Rekomendasi Arah Kebijakan *Good Governance*

- Meningkatkan transformasi birokrasi, pendayaan modal sosial, dan

- peningkatan akses publik melalui perbaikan hukum, ekonomi dan SDM.
- Meningkatkan netralitas birokrasi dan kemampuan pelayanan publik (terutama untuk kaum marjinal).
- Menjamin hak atas informasi, partisipasi dan hukum sebagai pilar *good governance*.
- Mengembangkan kepemimpinan nasional dan daerah yang mampu menggalang kesepakatan etis, mendayagunakan kearifan lokal dan menunjukkan keteladanan.
- Merumuskan kerangka tindakan jangka pendek untuk membangkitkan optimisme dan keyakinan bahwa perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjadi.
- Menjadikan perguruan tinggi sebagai *moral force* untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan reformasi pemerintahan menuju penciptaan *good governance* dan *clean government*.
- Memperbaiki manajemen pemerintahan sesuai asas-asas *good governance & clean government*.

## 8. Rekomendasi Arah Kebijakan Politik dan Keamanan

- Mengembangkan supremasi demokratik (bukan dikotomi militer-sipil).
- Menempatkan struktur TNI dan Polri dalam posisi yang tepat dan sesuai dengan tugas masing-masing.
- Mempertajam rasionalitas masyarakat dalam kehidupan politik.
- Mendorong tumbuhnya *bridging leaders*, istilahnya Aristides Katoppo, dan *collective leadership* pada semua unsur pemerintahan yang pokok untuk menjalankan tugas kepemimpinan nasional yang mampu *preaching, teaching, healing, and giving*.
- Menjadikan Pemilu sebagai momentum yang efektif untuk tumbuhnya *strong and daring leaders*.
- Mengembangkan sistem politik yang demokratis melalui reformasi dan penyederhanaan partai-partai politik.

## D. Kualitas Pemandu Bangsa

Bagaimana kualitas Pemandu Bangsa yang mampu menjalankan kebijakan-kebijakan seperti diuraikan di atas. Pada session terakhir Seminar Nasional “Meluruskan Jalan Reformasi” atas dasar masukan dan pemikiran dari para pembicara dan peserta, Prof. Dr. Djamaludin Ancok dan Prof. Koento Wibisono menyimpulkan Pemilu 2004 harus mampu menghasilkan *collective leadership* yang terdiri atas 3 unsur kekuatan politik bangsa. Pemimpin nasional yang terpilih harus memiliki kualitas kepemimpinan sebagai berikut:

- Memegang teguh nilai-nilai hakiki Pembukaan dan UUD 1945



- Mampu menjangkau seluruh unsur bangsa
- Memiliki kadar intelektualitas yang tinggi
- Mempunyai visi pembangunan bangsa yang jelas
- Mempunyai kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan bangsa khususnya pendidikan
- Memiliki integritas moral
- Bersih dari praktek KKN
- Memiliki kualitas negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- Memiliki gaya kepemimpinan yang menyejukkan
- Berani bertindak

Yogyakarta, 27 September 2003